

BAB 5

KESIMPULAN

Berbagai aksi maupun strategi yang dijalankan oleh masing – masing aktor, baik negara versus masyarakat Ogoni selama tahun 1993 – 1998 merupakan gambaran bahwa konflik kepentingan yang melatarbelakangi terjadinya konflik di tanah Ogoni sangat kompleks dan cenderung berkepanjangan. Penulis menyimpulkan ada perbedaan kepentingan mendasar antara negara dan masyarakat Ogoni terkait konflik ini.. Perbedaan paradigma antara negara dan masyarakat Ogoni akan sumber daya alam dan lingkungan merupakan permasalahan mendasar yang berimplikasi pada kepentingan masing – masing aktor yang saling berbenturan, dan adanya relasi kekuasaan yang asimetris antara negara dan masyarakat Ogoni. Kuatnya kepentingan ekonomi politik pemerintah dalam hal eksploitasi minyak ini didasarkan pada beberapa hal sesuai dengan ciri - ciri negara dalam kajian ekologi politik di Negara Dunia Ketiga; *Pertama*, besarnya keuntungan yang didapat dari aktivitas *rent seeking* baik dari sektor legal maupun illegal, yang menjadi ladang bagi terjadinya korupsi oleh elit – elit militer. Rezim militer di bawah pemerintahan Jendral Sani Abacha, telah menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang *kleptocracies*, ditandai dengan banyaknya kasus korupsi yang berasal dari aktivitas industri minyak yang dilakukan oleh elit – elit militer.

Kedua, besarnya keuntungan tersebut merupakan sumber pemasukan terbesar yang menyokong perekonomian negara. Semenjak ditemukannya minyak di Nigeria, hingga awal 1990-an, minyak telah menjadi sumber daya ekonomi utama menggantikan produksi pertanian. Kontribusi minyak yang begitu besar dalam pendapatan nasional Nigeria, bahkan hingga mencapai kurang lebih 80% dari sumber pendapatan negara, telah menjadi sebuah fenomena umum yang kerap terjadi di Negara – Negara Dunia Ketiga yang kaya akan sumber daya alam. Akibatnya aktivitas perekonomian negara didominasi oleh aktivitas ekonomi minyak, sehingga melupakan sumber daya ekonomi lainnya.

Ketiga, besarnya alokasi pendapatan dari sumber daya minyak semakin memperkuat posisi pemerintah pusat (federal) semakin kuat dibandingkan dengan

negara – negara bagian, yang sesuai dengan ciri pemerintahan kebanyakan rezim militer yang cenderung terpusat maupun kecenderungan yang kerap terjadi dalam bentuk negara Otoriter Birokratik. *Keempat*, hal ini ditandai pula dengan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan pihak *Shell Petroleum Development Company (SPDC)* yang secara tidak langsung semakin memperkuat posisi dan keberlangsungan pemerintahan yang cenderung otoriter ini. Kuatnya hubungan ini juga menandakan adanya hubungan subordinat, dimana negara menjadi subordinat terhadap modal asing yang seringkali terciirkan dengan kerelaan otoritas negara untuk melakukan berbagai tindakan represif kepada pihak manapun yang menghalangi kepentingan mereka.

Di bawah pemerintahan rezim Otoriter Birokratis Abacha, pemerintah tidak segan – segan melakukan tindakan ‘pembersihan’ terhadap etnis Ogoni selama kurun waktu 1993-1998. Dengan dalih demi keamanan nasional, tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah juga merupakan sebuah bentuk kewaspadaan dari pemerintah sendiri akan adanya ancaman meluasnya semangat perjuangan masyarakat Ogoni pada etnis – etnis lain. Bagi pemerintah, hal ini dinilai sebagai ancaman serius, bahkan lebih signifikan dari ancaman degradasi lingkungan, karena adanya perlawanan dan tuntutan dari masyarakat lokal di daerah – daerah kaya minyak akan sangat mengganggu kepentingan ekonomi politik negara. Hal ini sekaligus semakin menguatkan juga posisi negara sebagai ‘*destroyer*’ lingkungan dalam konsep *amalgam state*.

Sementara itu di sisi lain, masyarakat justru menerjemahkan nilai sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya berdasarkan pada kepentingan ekonomi politik saja, tapi juga berdasarkan kepentingan ekologi politik. Bentuk kepentingan masyarakat Ogoni tersebut tertuang dalam *Ogoni Bill of Rights*, disertai aksi yang dilakukan oleh *Movement for the Survival of the Ogoni Peoples (MOSOP)*. Kelahiran *MOSOP*, maupun berbagai strategi yang digunakan oleh *MOSOP* merupakan sebuah ciri umum pada *grassroot organizations* dalam kajian ekologi politik di Negara Dunia Ketiga. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, seperti; *pertama*, degradasi lingkungan yang selama ini terjadi di tanah Ogoni berdampak langsung kepada aktivitas perekonomian masyarakat Ogoni, yang sebagian besar masih tergantung kepada lingkungan sekitar. Kebanyakan

masyarakat Ogoni masih mengandalkan sumber mata pencaharian mereka melalui aktivitas seperti perikanan, maupun pertanian, yang karena dampak degradasi lingkungan telah membuat mereka harus mencari sumber mata pencaharian lain, ataupun menjadi pengangguran. Bagi masyarakat Ogoni, lingkungan mereka lihat tidak berdasarkan kepada keuntungan material belaka, tetapi lebih kepada sebuah entitas lain di dalam kehidupan mereka yang harus dijaga dan dihargai. Keberadaan lingkungan, juga menyangkut keberlangsungan identitas kultural mereka. Jika lingkungan mereka terus menerus terdegradasi, nilai – nilai kultural yang selama ini mereka anut akan menjadi semakin terkikis, bahkan mungkin akan hilang. Tanah Ogoni yang selama ini menjadi situs kebudayaan mereka, akan hilang seiring dengan ketiadaan lingkungan yang juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat lokal yang bermukim di tanah itu lagi. Sedikit demi sedikit hal ini semakin terbukti, dengan banyaknya masyarakat Ogoni yang mengungsi ke daerah bahkan negara lain, akibat konflik yang terjadi di Ogoni.

Kedua, selama ini tidak pernah ada perwakilan masyarakat Ogoni di dalam institusi formal negara. Kepentingan dan aspirasi masyarakat Ogoni tidak pernah tersampaikan dan terus menerus diabaikan oleh pemerintah. Di bawah rezim militer yang memerintah dengan otoriter, semua aspirasi dan kepentingan etnis – etnis minoritas seperti Ogoni tidak pernah menjadi perhatian. Akibatnya kemunculan *grassroots organizations* seperti *MOSOP* menjadi suatu hal yang wajar. *Ketiga*, adanya aktor internasional yang juga banyak berperan dalam perjuangan *MOSOP*. Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Ogoni telah menjadi sebuah contoh sebuah gerakan yang mendapat dukungan dan apresiasi begitu besar di dunia internasional, tidak serta merta akan mendapatkan hal yang serupa di internal negara mereka. Tuntutan bahkan kecaman yang dilakukan oleh dunia internasional ternyata tidak menuai pengaruh yang positif selama kurun waktu tersebut. Yang terjadi justru represi maupun ‘pembersihan’ yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah Nigeria terhadap masyarakat Ogoni. Bagaimanapun, dalam relasi asimetris yang terjadi antara negara dan masyarakat Ogoni, masyarakat berada dalam posisi yang cukup lemah, baik secara struktur maupun kekuasaan.

Keempat, dengan digantungnya sembilan aktivis *MOSOP* tersebut (termasuk Ken Saro-Wiwa) di dalamnya juga menandakan, bahwa pemerintah mengetahui dengan jelas betapa signifikannya peran seorang Ken Saro-Wiwa sebagai *opinion formers* dalam perjuangan dan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Ogoni. Dengan membunuh aktor utama yang berperan penting dalam perjuangan masyarakat Ogoni, pemerintah sekaligus melemahkan kembali kekuatan dan perjuangan masyarakat Ogoni yang selama ini telah dibangun melalui kampanye dan lobi yang dilakukan oleh Ken Saro-Wiwa di tingkat internasional. Ditambah lagi dengan akses politik mereka di dalam negeri, yang sejak semula telah ditutup oleh pemerintah, dengan demikian aktivitas perlawanan mereka akan terhambat dengan sendirinya, karena mereka tidak lagi memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka (apalagi) di tengah situasi Negara Otoriter Birokratik di bawah Abacha.

Pada akhirnya dapat disimpulkan pula, kepentingan berupa perlindungan lingkungan belumlah menjadi sebuah wacana yang penting untuk diprioritaskan di Nigeria. Kepentingan negara yang masih berorientasi kepada pembangunan ekonomi yang berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan nasional, secara tidak disadari telah menenggelamkan arti dan pentingnya lingkungan bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Keberadaan badan – badan perlindungan lingkungan maupun berbagai kebijakan lingkungan di Nigeria, hanyalah sekedar formalitas, yang lemah dalam tataran implementasi maupun hukum. Walau bagaimanapun kepentingan ekonomi politik masih lebih mempengaruhi paradigma pemerintah Nigeria.

Kemampuan pemerintah Nigeria untuk mengelola maupun memelihara sumber daya alam dan lingkungan yang masih sangat minim, berbanding terbalik dengan tuntutan masyarakat lokal seperti Ogoni yang telah mengedepankan arti pentingnya pemeliharaan lingkungan bagi masyarakat. Jika pandangan negara mengenai prosedur apa yang benar dan bobot dari distribusi kemanfaatan tidak memenuhi harapan masyarakat setempat, akibatnya adalah konflik yang berkepanjangan seperti yang digambarkan dalam prakondisi Konflik Sosial yang Berkepanjangan (*Protracted Social Conflict*). Konflik berbasis ekologi seperti di Ogoni ini akan mengarah kepada sebuah konflik yang berkepanjangan dan tidak

dapat terselesaikan dengan mudah, selama pemerintah belum menyadari dan menempatkan kepentingan akan perlindungan terhadap lingkungan dalam agenda nasional mereka.

Dari segi praktis, menurut penulis penelitian ini dapat menjadi sebuah model strategi bagi *grassroots organizations* di Indonesia, dalam mengedepankan kepentingan mereka mengenai keberlangsungan lingkungan hidup. Apalagi situasi di Nigeria memiliki beberapa kesamaan dengan situasi yang terdapat di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan strategi dan langkah perjuangan berdasarkan nilai – nilai positif yang dilakukan oleh *MOSOP* maupun juga menarik pembelajaran dari kegagalan – kegagalan yang dihadapi oleh *MOSOP*, untuk dapat mengambil langkah alternatif lainnya yang lebih efektif dan efisien.

Sementara bagi pemerintah, diharapkan konflik yang terjadi di Ogoni ini menjadi sebuah gambaran dan perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk dapat lebih mengedepankan perlindungan akan lingkungan dan hak – hak masyarakat lokal di daerah – daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dengan melihat contoh kasus di Ogoni beserta dampak yang terjadi (baik terhadap lingkungan maupun masyarakat) dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria, pemerintah diharapkan pula dapat menarik pelajaran untuk dapat bersikap lebih bijak dan tidak menggunakan cara – cara kekerasan sebagai langkah penanganan dalam konflik – konflik serupa yang terjadi di Indonesia. Hal ini sangat penting agar konflik serupa yang terjadi di Indonesia tidak mengalami akselerasi dan menjadi berkepanjangan seperti di Ogoni, sehingga negara akan mengalami kondisi krisis yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat lokal, tapi juga negara.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat terbuka untuk dilanjutkan dan didalami oleh peneliti lain yang berkaitan dengan isu ataupun analisis ekologi politik yang sama. Adapun hal yang menurut penulis masih dapat dikembangkan terkait dalam studi ini antara lain; elaborasi yang mendalam mengenai hubungan antara negara, masyarakat lokal disertai juga dengan aktor – aktor swasta seperti *Multi National Corporation (MNC)*, dalam kasus eksploitasi sumber daya alam, analisis mengenai dinamika konflik dalam skala yang lebih luas, mengingat banyaknya gerakan masyarakat lokal di daerah – daerah yang kaya akan sumber daya alam, dan sebagainya.